

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pemerintah sangatlah penting dalam perkembangan sektor publik mengingat pemerintah adalah entitas sektor publik yang mendominasi di negara ini. Sektor publik dianggap sebagai penyedia layanan umum maupun kepentingan publik dengan tujuan tanpa mencari laba dari pihak pemerintah kepada masyarakat baik berupa barang ataupun jasa. Kini, kinerja instansi pemerintahan menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik.

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang umum digunakan lembaga-lembaga publik sebagai salah satu tindakan tanggung jawab kepada publik. Saat ini dilakukan perhatian yang terfokus terhadap penerapan akuntansi yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga publik, baik lembaga publik non-pemerintah maupun akuntansi sektor pemerintahan. Lembaga publik dituntut masyarakat untuk dikelola secara transparan, akuntabel, dan memiliki tanggung jawab. Akuntabilitas, transparansi, dan rasa tanggung jawab ini diinginkan oleh para masyarakat agar terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban adalah bentuk dari transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam melayani masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedua aspek ini merupakan elemen

penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik, Maka dari itu perlu adanya pengelolaan anggaran yang baik pada suatu daerah. (Suharyono, 2019)

Terlaksananya penyelenggaraan anggaran daerah yang dinilai baik tidak terhindar dari adanya suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang. Selain dilakukan oleh pihak berwenang secara langsung, pengawasan juga dilakukan oleh badan legislatif (DPRD) ataupun lembaga pengawas khusus yang berguna untuk memantau/mengawasi proses perencanaan anggaran daerah. Pengawasan anggaran sangat diperlukan karena untuk memastikan apakah perencanaan yang dilakukan akan berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan anggaran yang baik adalah yang memiliki prinsip *value for money*. Penerapan prinsip *value for money* ini diyakini bisa memperbaiki performa sektor publik suatu daerah. Konsep *value for money* didefinisikan sebagai prinsip pengelolaan anggaran pada sektor publik yang berlandaskan tiga aspek, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *value for money* dapat dicapai jika suatu organisasi itu sudah memakai biaya input paling kecil dalam mencapai output yang optimal (Sudewi et al., 2017).

Kota Mojokerto merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur yang tergolong sedang berkembang. Sama seperti daerah-daerah yang lain, Kota Mojokerto ini tentunya membutuhkan dana cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor, yang besumber dari pemerintah daerah kota mojokerto sendiri. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang pemerintah daerahnya selalu giat melakukan upaya untuk meningkatkan

pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat ataupun Provinsi.

Fenomena yang dapat diperhatikan pada pengelolaan anggaran sekarang ini adalah adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik oleh organisasi-organisasi/badan pusat ataupun daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemerintah untuk menyajikan, memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan menggali segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawab pada masyarakat yang mempunyai hak serta kewajiban untuk mendapat pertanggungjawaban ini. Sedangkan sebuah transparansi dilakukan atas dasar informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasi mengenai pemerintahan perlu diakses, dan informasi yang ada harus *valid* agar dapat dimengerti dan dipantau.

Terkait dengan data anggaran di Kota Mojokerto bersumber dari kominfo.jatimprov.go.id, Walikota Mojokerto, mengatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap kebijakan umum anggaran pemerintah Daerah, adanya perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah maupun perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Dikatakannya, garis besar masing-masing pos dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*, karena ada penelitian terdahulu dengan hasil yang belum konsisten, yang dilakukan Setyaningrum

(2017) menghasilkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Didukung dengan penelitian Suharyono (2019) dengan variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengawasan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan anggaran berbasis *value for money*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuni, Debbi, & Rindhira (2020) dan Victorinus Laoli (2019) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Penelitian yang dilakukan Cindy Arifani (2018) menyimpulkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, sedangkan transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*. Selain itu, pada penelitian Detasya Rigian & Ratna Purnama Sari (2019) menyatakan bahwa Pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada OPD di Kota Mojokerto, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di instansi pemerintah Kabupaten Bone yang merupakan organisasi sektor publik. Tujuan dilakukannya penelitian di Kota Mojokerto karena peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan *output* hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Berdasarkan paparan uraian diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto. Penelitian ini penting dilakukan karena pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *value for money*, di masa pandemi ini masih terdapat anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas). OPD termasuk dalam bagian dari sektor publik yang selalu diperhatikan karena adanya pengelolaan anggaran yang tidak efisien. OPD-OPD ini seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasarkan pada *value for money*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *value for money* meupakan jembatan untuk mengantar pemerintah daerah mencapai *good governance* yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien.

Maka dari itu peneliti sekarang mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money* di Kota Mojokerto”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* di Kota Mojokerto

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana untuk perkembangan bagi segenap mahasiswa jurusan akuntansi mendapatkan pemahaman mengenai Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan, serta mengetahui konsep penganggaran berbasis *Value for Money*.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait apa saja yang mempengaruhi kinerja anggaran daerah bagi praktisi akuntansi sektor publik pemerintahan maupun non-pemerintahan.

3. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau kebijakan oleh pihak pemerintah Kota Mojokerto dalam penyusunan kebijakan penganggaran daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat terkait penjelasan latar belakang dari kinerja anggaran berbasis *Value for Money* dan kaitannya dengan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Selain itu, pada bab 1 ini pendahuluan juga dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan kerangka pemikiran yang dapat membantu perumusan hipotesis. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini akan membahas terkait proses ketika melakukan penelitian secara keseluruhan dimulai dari rancangan penelitian yang akan digunakan, batasan-batasan dalam penelitian, mengidentifikasi setiap variabel baik dependen maupun independen, definisi operasional dan pengukuran variabelnya, populasi yang digunakan, sampel yang dipakai dan metode atau teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data, instrumen penelitian data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subyek penelitian serta analisis data yang meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai pihak terkait maupun peneliti berikutnya.